

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA MENDIK KARYA KECAMATAN LONG KALI KABUPATEN PASER

JURAIDAH¹

Abstrak

Juraidah, Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Mendik Karya Kecamatan Long Kali kabupaten Paser, di bawah bimbingan Dr. Heryono Susilo Utomo, M. Si selaku pembimbing I dan Drs. M. Z. Arifin, M. Si selaku pembimbing 2.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Mendik Karya Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Karya Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian diantara lain partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan, pengawasan serta evaluasi pembangunan dan faktor penghambat serta pendukung dalam pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Mendik Karya Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa, Aparatur Desa, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Mendik Karya. Teknik analisis data yang di gunakan yaitu analisis data kualitatif model interaktif.

Hasil penelitan diperoleh penulis dalam meunjukkan peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangun di Desa Mendik Karya Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser masih perlu ditingkatkan lagi dikarenakan kurangnya Kepala Desa dalam memantau perkembangan masyarakat sehingga dapat mengakibatkan kurangnya masyarakat dalam berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, pemanfaatan serta evaluasi pembangunan di Desa Mendik Karya Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser.

***Kata Kunci: Peran Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan***

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politi, Universitas Mulawarman. Email:juraidah116@gmail.com

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengemukakan bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan otonomi daerah itu tercantum prinsip-prinsip penyelenggaraan yang mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah dan keanekaragaman daerah.

Di dalam pelaksanaan otonomi daerah, desa merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Hal ini berarti bahwa pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional dan merupakan unsur pokok dalam sistem pembangunan Indonesia.

Dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 mengakui adanya otonomi Desa, dan dengan adanya otonomi desa tersebut diharapkan desa akan menjadi mandiri. Kemandirian itu dipengaruhi beberapa faktor seperti, desentralisasi kewenangan, penguatan keuangan desa, penguatan kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat, kapasitas dan perangkat desa (SDM) serta pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, upaya memperkuat desa merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya Otonomi Desa dan kesejahteraan masyarakat, sebagai tujuan otonomi daerah dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

Dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 mengakui adanya otonomi Desa, dan dengan adanya otonomi desa tersebut diharapkan desa akan menjadi mandiri. Kemandirian itu dipengaruhi beberapa faktor seperti, desentralisasi kewenangan, penguatan keuangan desa, penguatan kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat, kapasitas dan perangkat desa (SDM) serta pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, upaya memperkuat desa merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya Otonomi Desa dan kesejahteraan masyarakat, sebagai tujuan otonomi daerah dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

Memusatkan pembangunan kearah pembangunan desa berarti melaksanakan amanat dari cita-cita kemerdekaan Indonesia dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang adil dan makmur. Dalam upaya mempercepat perkembangan desa, pembangunan dan pembinaannya perlu mendapat perhatian semua pihak. Dengan cara ini dapat diantisipasi dengan mudah segala permasalahan yang ada di desa. Sumber daya alam yang ada diupayakan penggunaannya secara optimal.

Mengingat pentingnya peran Pemerintah Desa dalam hal pembangunan baik itu fisik maupun non fisik di Desa Mendik Karya Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, maka perlu adanya kerja nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam hal pembangunan, disamping itu kerja sama oleh Perangkat Desa dengan masyarakat juga diperlukan. Karena itulah Pemerintah Desa harus

berperan secara maksimal dalam meningkatkan pemabangunan di Desa Mendik Karya Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser.

Apabila melihat kenyataan yang ada di Kabupaten Paser, pelaksanaan pembangunan yang terdapat pada tingkat desa masih tertinggal. Tidak sesuai dengan peran dan fungsi dari desa yang banyak memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan kehidupan yang ada diperkotaan. Disisi lain, dana dan program yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten untuk melaksnakan pembangunan di desa-desa juga tersedia.

Berdasarkan penelitian pendahuluan, dibandingkan dengan pembangunan di desa-desa lain yang wilayahnya berdekatan, pembangunan di Desa Mendik Karya masih jauh tertinggal. Ini dapat dilihat dari masih banyaknya fasilitas-fasilitas umum yang belum tersedia dan memadai seperti infrastruktur jalan yang tidak baik, jembatan yang tidak layak, sarana air bersih yang belum memadai, belum tersedia lokasi pasar memadai serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan aspirasi atau pendapat.

Melihat hal tersebut, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai **Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Mendik Karya Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser.**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Mendik Karya ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan, terutama di bidang Administrasi Publik khususnya pada perkembangan Pembangunan Desa serta sebagai latihan dalam menuangkan hasil pemikiran dan penelitian sesuai dengan ketentuan karya ilmiah.
2. Secara Paktis
Memberikan informasi bagi pembaca pada umumnya dan bagi pemerintah pada khususnya yang berhubungan dengan pembangunan Desa. Dengan demikian dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang muncul dalam melaksanakan pembangunan desa sehingga dapat memberikan masukan bagi pemerintah untuk mengatasinya, dan pada akhirnya terwujud pembangunan yang baik.

KERANGKA DASAR TEORI

Pengertian Peran

Menurut Rivai (2006:148) peran diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajiban. Artinya seseorang yang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka seseorang tersebut telah menjalankan suatu peran.

Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peran mencakup tiga hal, antara lain :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tertentu atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Pemerintah

Menurut Kusnardi dan Saragih (2008:112), “Pemerintah adalah alat bagi negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat dan juga, dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan”.

Desa

Menurut Widjaja (2001:44), menyatakan “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten”.

Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 3 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pengertian Partisipasi

Menurut Davis (dalam Lendriyono, 2007:71), Partisipasi masyarakat merupakan peristiwa psikologis yang mencakup keterlibatan mental dan emosional. Dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat mengamati, memilih, menafsirkan, memahami berbagai jenis informasi yang diterimanya untuk kemudian dilaksanakan dalam bentuk tindakan/action.

Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011:58), terbagi atas :

- 1) Partisipasi vertikal adalah suatu bentuk kondisi tertentu dalam masyarakat yang

terlibat didalamnya atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan mana masyarakat berada sebagai posisi bawahan.

- 2) Partisipasi horizontal adalah dimana masyarakat tidak mustahil untuk mempunyai prakarsa dimana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi secara horizontal antara satu dengan lainnya, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Menurut Effendi sendiri, tentu saja partisipasi seperti ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuan dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Departement of International Development* (DFID) (dalam Monique Suumampouw 2004:106-1007) adalah :

1. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau suatu proses proyek pembangunan.
2. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuh kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog
3. Kesetaraan Tanggung Jawab. Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
4. Kerjasama. Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.
5. Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
6. Kesetaraan Kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
7. Kesetaraan Tanggung jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.

Masyarakat

Aguste Comte dalam Basrowi (2005:39) mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Isbandi (2007:27) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan

masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Jenjang dalam Partisipasi Masyarakat

Menurut Riwo Kaho (2005:127) terdapat empat jenjang dalam partisipasi masyarakat :

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan
Setiap penyelenggaraan, terutama dalam kehidupan bersama, masyarakat pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
Hal ini menegaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang material, ataupun informasi berguna bagi pelaksanaan pembangunan.
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil
Anggota masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam menikmati setiap usaha bersama yang ada. Demikian pula dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, rakyat atau masyarakat harus dapat menikmati hasilnya secara adil. Sedangkan norma-norma yang dapat dijadikan ukuran dapat berupa norma hukum (peraturan perundang-undangan), ataupun berupa nilai-nilai etika dan moral keagamaan. Partisipasi dalam menikmati hasil dapat dilihat dari tiga segi, yaitu dari aspek manfaat materialnya (*Material benefit*), manfaat sosialnya (*Social benefit*), dan manfaat pribadi (*Personal benefit*).
4. Partisipasi dalam evaluasi
Sudah sepantasnya masyarakat diberi kesempatan menilai hasil yang telah dicapai. Sikap ikut memelihara dan melestarikan hasil yang telah dicapai, dapat dilihat dari indikasi adanya dukungan positif anggota masyarakat terhadap apa yang dihasilkan.

Pola Partisipasi

Menurut Koentjaraningrat yang di kutip oleh Khairuddin (2005:148) pola partisipasi masyarakat dalam rangka melaksanakan pembangunan dapat dibagi ke dalam beberapa pola sebagaimana berikut ini :

1. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.
Perasaan terlibat dalam perencanaan pembangunan harus ditumbuhkan, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan akan menumbuhkan kepercayaan kepada diri sendiri terhadap apa yang dibangun.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan.
Dalam pelaksanaan pembangunan, terutama pada program fisik yang telah direncanakan bersama, tentu membutuhkan keterlibatan ddari segenap masyarkat, karena walaupun rencana telah disusun dengan baik tanpa ada dukungan dalam pelaksanaannya, maka pembangunan itu juga tidak akan

berjalan dengan baik.

3. Partisipasi dalam Memelihara dan Memanfaatkan Hasil Pembangunan.
Partisipasi masyarakat dapat tumbuh apabila mereka telah dapat menikmati atau memperoleh manfaat dari pembangunan yang dijalankan, maka dengan sendirinya tentu diperlukan usaha melaksanakan pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat yang bersangkutan.

Pengertian Pembangunan

Menurut Siagian, (2005:4), memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Pada hakekatnya pembangunan merupakan suatu kegiatan yang disengaja antara pemerintah dan melibatkan peran serta masyarakat dalam menuju usaha modernitas dengan perencanaan yang arah.

Pembangunan Desa

Menurut Siagian (2003:108), “Pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa”.

3 (tiga) unsur utama yang perlu diperhatikan bagi keberhasilan pembangunan desa yaitu :

- a. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.
- b. Timbulnya gagasan-gagasan baru didalam masyarakat mengenai kehidupan mereka dimasa mendatang.
- c. Diterapkan teknologi yang tepat guna dan padat karya.

Tujuan Pembangunan

Khairuddin (2002:29), menyatakan pada umumnya, komponen dari cita-cita dari Negara modern di dunia baik yang sudah maju ataupun yang sedang berkembang, adalah hal-hal yang pada hakikatnya adalah bersifat relatif dan sukar membayangkan tercapainya “titik jenuh” yang absolut yang setelah tercapai tidak mungkin ditingkatkan lagi seperti :

- a) Keadilan sosial
- b) Kemakmuran yang merata
- c) Perlakuan sama dimata hukum
- d) Kebahagiaan mental, spiritual, dan material
- e) Kebahagiaan untuk semua
- f) Ketentraman, dan keamanan

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional dari penelitian ini adalah yang dimaksud dengan Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam

Pembangunan di Desa adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam membangun Desa Mendik Karya dengan melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta evaluasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan yang bertujuan untuk perubahan ke arah lebih baik .

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nawawi (2005:63) yaitu Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Fokus Penelitian

- 1) Mengkoordinasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
 - a. Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan
 - b. Partisipasi dalam Pelaksanaan Pembangunan
 - c. Partisipasi dalam Pemanfaatan, Pengawasan serta Evaluasi Pembangunan
- 2) Faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Mendik Karya Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser .

Sumber Data

1. Data Primer yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari informan. Informan kunci (*key informan*) dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Desa Mendik Karya. Sedangkan informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Kaur Umum, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kepala Dusun, Ketua RT, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Mendik Karya.
2. Data Sekunder yaitu data diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain dokumen dan buku-buku ilmiah.

Teknik Pengumpulan Data

1. Library Research yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi. Buku yang dijadikan pedoman pada penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan peran pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan pembangunan desa.
2. *Field Work Research* yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif dari Miles, Huberman dan Jhony Saldana (2014;133) mengatakan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari tiga komponen yaitu :

1. Kondensasi Data (*Data Conndensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Kondensasi data yang dipersiapkan dapat ditemukan pada kerangka konseptual, pada kasus-kasus, pada pertanyaan penelitian, dan pada pendekatan pengumpulan data yang dipilih.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Alur penting kedua dari aktivitas analisis adalah penyajian data. Secara umum, penyajian adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Pola frekuensi yang paling sering untuk data kualitatif di masa lalu telah memperluas teks. Dengan menggunakan teks yang luas menjadikan peneliti kemungkinan menemukan kemudahan untuk melompat menuju ketergesaan, parsialitas, dan tidak menemukan kesimpulan.

3. Penganbilan Kesimpulan dan Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Dari awal pengumpulan data, analisis kualitatif menginterpretasikan hal-hal apa yang tidak berpola, penjelasan-penjelasan, alur kausal, dan proposisi. Kesimpulan akhir tidak akan datang hingga pengumpulan data berakhir, tergantung pada ukuran catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencaharian yang digunakan, daya tarik peneliti, dan batas-batas lain yang dapat ditemukan. Verifikasi dapat menjadi penentu sebagaimana lintasan kedua dari pikiran melalui tulisan, dengan rincian pendek dari catatan-catatan lapangan atau tidak dicari dan digabungkan dengan argumentasi pendek dan revidi dari kolega untuk membangun "*consensus intersubjektif*" atau dengan hasil baik untuk menampilkan bentuk lain dari penemuan dalam data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Mengkoordinasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah sejauh mana masyarakat berperan aktif atau dilibatkan dalam proses menyumbangkan pikiran untuk menyusun dan menetapkan program pembangunan. Partisipasi masyarakat dan keterlibatan masyarakat dapat dilihat melalui kegiatan musyawarah rencana pembangunan yang diadakan di Desa Mendik Karya. Rapat atau musyawarah merupakan salah satu wadah yang sangat penting bagi Kepala Desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena di dalam musyawarah tersebut dibahas seluruh permasalahan atau persoalan pemabngunan yang dilaksanakan.

Dalam partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan seperti berperan aktif dan keterlibatan langsung masyarakat penerima program dalam wujud pikiran sebagai informasi dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan, hal ini sesuai dengan pendapat Isbandi (2007:27), yaitu partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan

Program pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa tidak selalu mendapat dukungan yang berimbang pada terserapnya partisipasi masyarakat. Hal ini dipengaruhi kondisi, karakteristik, dan sosial budaya atau adat istiadat masyarakat setempat. Dengan demikian, kebutuhan akan format dalam komunikasi pembangunan yang tepat jadi sangat relevan. Pembangunan dibidang fisik terutama memang perlu diprioritaskan karena pembangunan bidang fisik ini lebih memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Dalam hal ini, pembangunan yang dimaksudkan seperti gotong-royong membersihkan lingkungan, perbaikan posyandu, dan memperbaiki sarana dan prasarana umum.

Sesuai dengan pendapat Slamet yang dikutip oleh Suryono (2001:142) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diartikan sebagai ikut serta masyarakat dalam pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil dari pembangunan. Dimana diketahui bahwa melaksanakan kegiatan bergotong-royong dari pembangunan tersebut masyarakat akan menikmati hasil pembangunan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan, Pengawasan serta Evaluasi Pembangunan

Berkenaan dengan uraian tentang partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan, pengawasan serta evaluasi pembangunan, maka masyarakat memiliki peran untuk memanfaatkan hasil pembangunan dengan baik dengan cara menggunakan, menjaga serta merawat hasil pembangunan tersebut, mengawasi setiap pembangunan yang sedang berjalan serta mengevaluasi setiap pembangunan yang sedang berjalan maupun pembangunan yang telah berhasil.

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan, pengawasan serta evaluasi pembangunan merupakan tindak lanjut pembangunan secara partisipatif yang dilakukan pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan pendapat Riwo Kaho (2005:127) yang dimana terdapat empat jenjang partisipasi yaitu mulai dari pembuatan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil serta dalam mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dicapai.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung yang dihadapi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa

Mendik Karya

Faktor Penghambat

Faktor penghambat disini yaitu berasal dari individu itu sendiri yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah sumber daya manusia dan tingkat kesadaran masyarakat sendiri serta masalah yang berasal dari luar diri masyarakat. Masyarakat seharusnya ikutserta dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan untuk mempermudah jalannya kegiatan yang dilaksanakan agar hasil yang dicapai sesuai dengan kebijakan yang diambil bersama. Kurangnya koordinasi yang ada antara tingkat instansi di pemerintahan merupakan hambatan eksternal berikutnya, ketidaksamaannya antara pihak desa dengan pihak kabupaten merupakan salah satu faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Mendik Karya.

Hal ini sesuai dengan teori Slamet (1993:97, 137-143). Kesadaran masyarakat yang rendah merupakan salah satu hambatan pelaksanaan pembangunan. Kurangnya kesadaran masyarakat yang rendah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang akan melakukan pembangunan kepada masyarakat mengakibatkan masyarakat kurang memiliki terhadap hasil pembangunan.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu didukung dengan adanya potensi sumber daya alam yang siap dikelola, keadaan wilayah cukup luas serta tersedianya anggaran untuk pembangunan yang dialokasikan melalui ADD yang telah ditetapkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di Desa Mendik karya. Kebijakan bersama dengan pihak swasta dan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan merupakan faktor pendukung bagi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Mendik Karya masih belum optimal dikarenakan kurangnya Kepala Desa dalam memantau perkembangan masyarakat sehingga dapat mengakibatkan kurangnya masyarakat dalam berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan maupun pengawasan serta evaluasi pembangunan di Desa Mendik Karya.
2. Faktor Penghambat Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ditemui yaitu masalah yang menyangkut rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Kemudian kurangnya sosialisasi dari instansi-instansi yang akan melakukan kegiatan pembangunan kepada masyarakat yang mengakibatkan kurangnya rasa memiliki terhadap hasil pembangunan dan kurangnya koordinasi yang dilakukan antar instansi.

Sedangkan Faktor Pendukung Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu adanya anggaran untuk pembangunan yang telah dialokasikan melalui ADD Desa Mendik Karya dan keadaan wilayah yang cukup luas serta potensi sumber daya alam di bidang pertanian dan perkebunan yang siap dikelola pemerintah dan masyarakat.

Saran

1. Pemerintah Desa Mendik Karya perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga masyarakat dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan serta masyarakat merasa memiliki terhadap hasil pembangunan.
2. Seharusnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi lebih ditingkatkan lagi untuk menunjang pelaksanaan pembangunan yang lebih baik dan seharusnya pihak Pemerintah Desa Mendik Karya bersama masyarakat dan instansi-instansi yang akan melakukan kegiatan pembangunan memiliki koordinasi serta hubungan yang terjalin dengan baik sehingga perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai akan berjalan dengan baik dan sesuai rencana.
3. Serta diharapkan masyarakat setempat peduli terhadap pembangunan yang ada di daerahnya.

Daftar Pustaka

- Afifuddin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Alfabeta. Bandung
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Abe, Alxander. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo : Pondok Edukasi.
- Basrowi, 2005. *Pengantar Sosiologi*. Graha Indonesia Bogor
- Khairuddin. 2005. *Sketsa Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*, Averroes Press, Malang.
- Moleong, Lexi J. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Penerbit . PT. Remaja Rosada Karya. Bandung.
- Milles, Methew B, A. Michael Huberman and Jhony Saldana. 2014. *Qualitative Data Analytistiod, A Methode Sourcebook, Third Edition*. Sage Publication, Inc.
- Ndraha, Taliziduhu. 2001. *Metodelogi Pembangunan Desa*. PT. Bina Aksara. Jakarta.
- Nogi, Hessel S. Tangkilisan. 2005. *Manajemen Publik*. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Patton, Adri. 2005. *Peran Informal Leader Dalam Pembangunan Desa Daerah Perbatasan Kabupaten Malinau*. Malang : Universitas Brawijaya
- Siagian, Sondang P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit : Bumi Aksara. Jakarta.
- Soekanto, Soejono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Terbaru*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2010 *Metode Penelittian Pendidikan Pendekatan Kuantitaitf, Kualitatif*

dan HRD, Penerbit Alfabeta CV.

Sumaryadi, I, Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*: CV. Citra Utama

Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Jakarta: UM-Press.

Syafii, Kencana Inu. 2001 *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Refika Aditama, Malang.

Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir. 2012. *Administrasi Pemerintah Daerah*, Penerbit Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. PT. Grafindo Persada. Jakarta.

Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru* . Semarang: Cloggaps Diponegoro University.

Dokumen-Dokumen :

Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*

_____, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*